



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TETTY KURNIAWATI
2. Jabatan : DIREKTUR RSUD
3. NHK : 727751

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.650.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 445 m2/300 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah Seluas 340 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/98 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/50 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 693.000.000

1. MOTOR, VARIO - Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOBIL, PAJERO - Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. MOBIL, SEDAN HONDA CIVIC CIVIC FD2.0 AT Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
4. MOBIL, TRITON - Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
5. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
6. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 25.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----



E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 1.790.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 5.158.000.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.158.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.